### LAPORAN

# HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

**TAHUN 2020** 

#### **DAFTAR ISI**

BAB	I	1
PEN	DAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud Dan Tujuan	2
1.3.	Landasan Hukum	2
1.4.	Rencana Kerja	3
BAB	II	5
MET	ODOLOGI	5
2.1.	Metode Penelitian	5
2.2.	Populasi Dan Sampel	5
2.3.	Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4.	Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	ε
2.5.	Teknik Analisis Data	ε
2.6.	Tahapan pelaksanaan	7
BAB	III	S
INDE	EKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	S
3.1.	Profil responden	S
3.2.	Indeks persepsi anti korupsi per indikator	14
3.3.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	24
3.4.	Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	25
BAB	IV	29
PEN	UTUP	29
4.1.	Kesimpulan	29
12	Pokomondasi	20

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

#### 1.2. Maksud Dan Tujuan

Hasil Maksud Penyusunan Laporan Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

#### 1.3. Landasan Hukum

- 1999 28 a) Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi | 2

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### 1.4. Rencana Kerja

#### 1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - Jumlah Responden.
  - Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data. b.
- Penyusunan Jadwal Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### 1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Kuesioner Pengisian oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi | 3

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### 1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

#### **BAB II**

#### **METODOLOGI**

#### 2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) deskriptif kuantitatif. menggunakan metode Penelitian adalah penelitian dilakukan deskriptif yang untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### 2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### 2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tatap muka. Pengumpulan tanpa wawancara dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek saat berkomunikasi kerja petugas pelaksana dengan membagikan dan mengumpulkan kuesioner, responden, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

#### 2.5. **Teknik Analisis Data**

Analisis menentukan indeks data untuk korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan skor persepsi paling tinggi nilai 4 merupakan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi | 6

perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

#### 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi | 7

Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

#### **BAB III**

#### INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

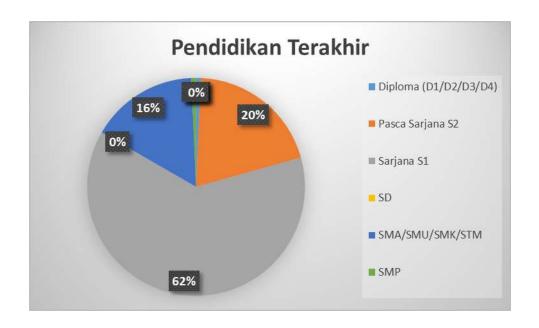
#### 3.1. Profil responden

#### 3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar mayoritas memiliki latar Sarjana.

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Diploma (D1/D2/D3/D4)	1	0,70
2	Pasca Sarjana S2	30	20,00
3	Sarjana S1	94	62,70
4	SD	0	0,00
5	SMA/SMU/SMK/STM	24	16,00
6	SMP	1	0,70
7	Tidak Sekolah	0	0,00
8	Tidak mencantumkan Pendidikan	0	0,00
	Jumlah	150	100

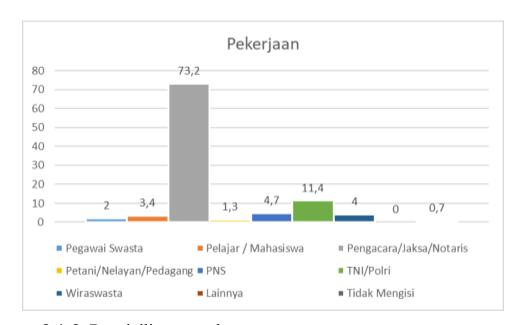


#### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 73,2% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar mememiliki pekerjaan sebagai Pengacara/Jaksa/Notaris yang bekerja di bidang Hukum.

Tabel 5. Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	Pegawai Swasta	3	2,0
2	Pelajar / Mahasiswa	5	3,4
3	Pengacara/Jaksa/Notaris	109	73,2
4	Petani/Nelayan/Pedagang	2	1,3
5	PNS	7	4,7
6	TNI/Polri	17	11,4
7	Wiraswasta	6	4,0
8	Lainnya	0	0,0
9	Tidak Mengisi	1	0,7
	Jumlah	150	100



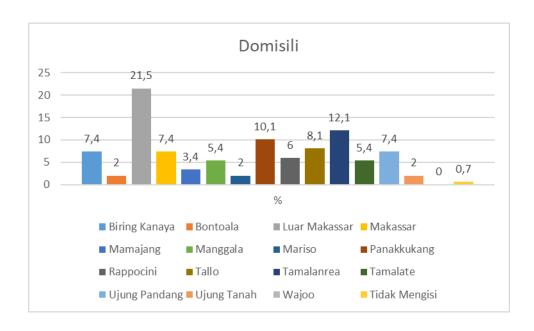
#### 3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari luar Makassar dengan 21,5% yang mungkin beranggapan bahkwa kota Makassar.

Tabel 6

Domisili Responden

No	Domisili	Frekuensi	%
1	Biring Kanaya	11	7,4
2	Bontoala	3	2,0
3	Luar Makassar	32	21,5
4	Makassar	11	7,4
5	Mamajang	5	3,4
6	Manggala	8	5,4
7	Mariso	3	2,0
8	Panakkukang	15	10,1
9	Rappocini	9	6,0
10	Tallo	12	8,1
11	Tamalanrea	18	12,1
12	Tamalate	8	5,4
13	Ujung Pandang	11	7,4
14	Ujung Tanah	3	2,0
15	Wajoo	0	0,00
16	Tidak Mengisi	1	0,7
	Jumlah	150	100

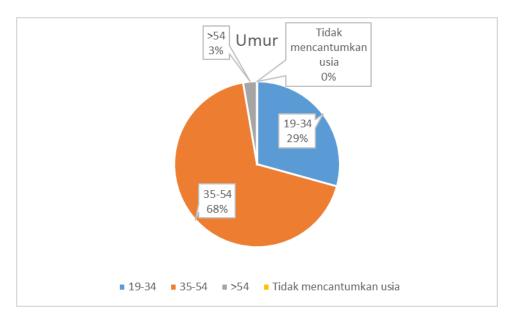


#### 3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 35 tahun s/d 54 tahun. Bagi kelompok usia di atas 54 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 7.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	19-34	44	29,3
2	35-54	102	68,0
3	>54	4	2,7
6	Tidak mencantumkan usia	0	0
Jumlah		150	100



#### 3.1.5. Layanan yang digunakan

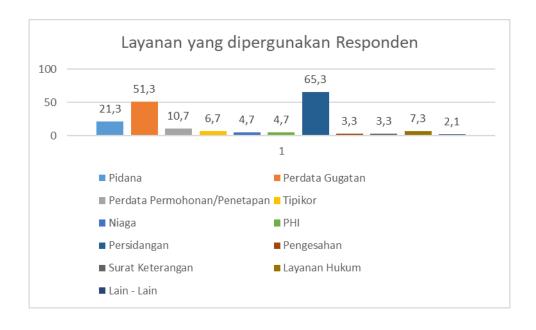
Layanan Persidangan menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 65,3% akibat banyaknya pengunjung sidang di setiap persidangan.

Tabel 8.

Jenis layanan yang dipergunakan responden

No	Layanan	Frekuensi	%
1	Pidana	32	21,30
2	Perdata Gugatan	77	51,30

۱ ۵	Devilete Devisely and /Devistance	10	40.7
3	Perdata Permohonan/Penetapan	16	10,7
4	Tipikor	10	6,7
5	Niaga	7	4,7
6	PHI	7	4,7
7	Persidangan	98	65,3
8	Pengesahan	5	3,3
9	Surat Keterangan	5	3,3
10	Layanan Hukum	11	7,3
11	Lain - Lain	3	2,1
	Jumlah	150	100



#### 3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

#### 3.2.1. <u>Indikator Manipulasi Peraturan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,85 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari presepsi Korupsi terhadap manipulasi peraturan.

Tabel 9. Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	Manipulasi Peraturan	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	1	0,66	1
2	Sering	4	2,66	8
3	Jarang	3	2,0	9
4	Tidak ada	140	93,33	560
0	Tidak Mengisi	2	1,33	
	Jumlah	150	100	578
	NRR Tertimbang			3,8533



#### 3.2.2. <u>Indikator Penyalahgunaan Jabatan</u>

Dari skala 1 hasil persepsi sampai 4, responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,85 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Makassar pada Pengadilan Negeri bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 10. Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Penyalahgunaan Jabatan	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	2	1,33	2
2	Sering	2	1,33	4
3	Jarang	4	2,67	12
4	Tidak ada	140	93,33	560
0	Tidak Mengisi	2	1,33	
	Jumlah	150	100	578
	NRR Tertimbang			3,85333



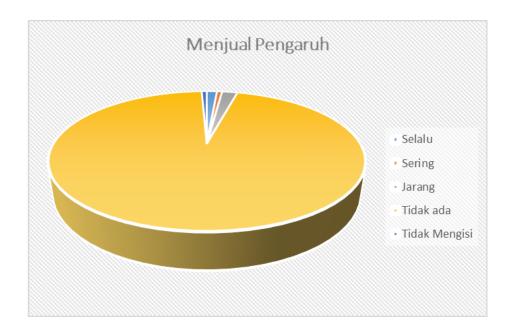
#### 3.2.3. <u>Indikator Menjual Pengaruh</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,9

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11. Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Menjual Pengaruh	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	2	1,33	2
2	Sering	1	0,67	2
3	Jarang	3	2	9
4	Tidak ada	143	95,33	572
0	Tidak Mengisi	1	0,67	
	Jumlah	150	100	585
	NRR Tertimbang			3,9



#### 3.2.4. <u>Indikator Transaksi Biaya</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,89

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan keterbukaan publik dengan transparansi Biaya di Meja PTSP, Website, Pamflet dan Banner

Tabel 12. Indeks pada indikator transaksi biaya

No	Transparansi Biaya	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	0	0	0
2	Sering	3	2	6
3	Jarang	7	4,67	21
4	Tidak ada	139	92,67	556
0	Tidak Mengisi	1	0,67	
	Jumlah	150	100	583
	NRR Tertimbang			3,8866



#### 3.2.5. <u>Indikator Biaya Tambahan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,88

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar biaya pelayanan itu dapat dilihat di website, papan pengumuman, banner dan liftlet, sehingga tidak bisa meminta biaya tambahan yang diluar SK Ketua tentang panjar biaya perkara.

Tabel 14. Indeks pada indikator tambahan biaya

No	Biaya Tambahan	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	2	1,33	2
2	Sering	2	1,33	4
3	Jarang	4	2,67	12
4	Tidak ada	141	94	564
0	Tidak Mengisi	1	0,67	
	Jumlah	150	100	582
	NRR Tertimbang			3,88



#### 3.2.6. <u>Indikator Hadiah</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,88.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar tidak pernah menerima gratifikasi dan hadiah dalam bentuk apaapun juga, dan jika ada maka wajib melapor kepada Tim Gratifikasi Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel 15. Indeks pada indikator hadiah

No	Hadiah	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	2	1,33	2
2	Sering	0	0	0
3	Jarang	8	5,33	24
4	Tidak ada	139	92,67	556
0	Tidak Mengisi	1	0,67	
	Jumlah	150	100	582
	NRR Tertimbang			3,88



#### 3.2.7. <u>Indikator Transparansi Pembayaran</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3,85** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap pembayaran sudah transparan dengan adanya meja PTSP.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No	Transparasi Biaya	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	2	1.33	2
2	Sering	2	1,33	4
3	Jarang	4	2,66	12
4	Tidak ada	140	93,33	560
0	Tidak Mengisi	2	1,33	
	Jumlah	150	100	578
	NRR Tertimbang			3,8533



#### 3.2.8. <u>Indikator Percaloan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,84.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari tindakan Percaloan. Terutama pada pengurusan Tilang, sudah tidak ada lagi praktik percaloan di Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel 17. Indeks pada indikator percaloan

No	Percaloan	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	1	0,66	0
2	Sering	1	0,66	2
3	Jarang	9	6	27
4	Tidak ada	137	91,33	548
0	Tidak Mengisi	2	1,33	
	Jumlah	150	100	577
	NRR Tertimbang			3,8466



#### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,84

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Negeri Makassar bersih pada Pengadilan dari perbuatan curang.

Tabel 18. Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Perbuatan Curang	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	1	0,67	1
2	Sering	3	2,00	6
3	Jarang	11	7,33	33
4	Tidak ada	134	89,33	536
0	Tidak Mengisi	1	0,00	
	Jumlah	150	100	576
	NRR Tertimbang			3,84



#### 3.2.1. Indikator Transaksi Rahasia

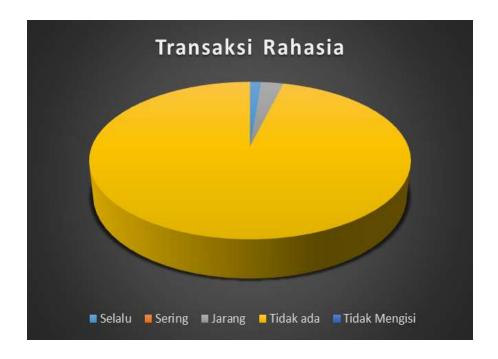
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,93

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan pencegahan terhadap Transaksi Rahasia dengan meyiapkan meja PTSP dan pengawasan melekat.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No	Transaksi Rahasia	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	2	1,33	2
2	Sering	0	0	0
3	Jarang	4	2,67	12
4	Tidak ada	144	96,00	576
0	Tidak Mengisi	0	0,00	
	Jumlah	150	100	590
	NRR Tertimbang			3,933



#### 3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar sebesar 38,726.

Tabel 19. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata- rata
U1	Manipulasi Peraturan	3,8533
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,8533
U3	Menjual Pengaruh	3,9
U4	Transparansi Biaya	3,8866
U5	Biaya Tambahan	3,88
U6	Hadiah	3,88
U7	Transparansi Biaya	3,8533
U8	Percaloan	3,8466
U9	Perbuatan Curang	3,84
U10	Transaksi Rahasia	3,933
	Total	38,726
	Rata Rata	3,8726

Indeks 3,87 tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 4.

Tabel 20.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
pada pengadilan Negeri Makassar

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

# 3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

# Tabel 21. Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

NO	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	baik
2	pelayan yang baik, kalo bisa semakin ditingkatkan
3	sudah baik
4	pelayanan mantap
5	pelayanan yang memuaskan
6	lebih ditingkatkan lagi semangat anti korupsinya
7	lebih baik lagi
8	lebih baik lagi dalam semangat anti korupsi
9	lebih baik lagi
10	Menurut saya semuanya baik
11	Karena pengadilan kelas I.A telah banyak menyidangkan khasus saran mungkin sidang bisa di laksanakan sesuai jadwal yang sudah di tentukan,Trimah kasih.
12	Kalau bisa akses bertemu dgn panitera pengganti dan majelis hakim tidak sulit apabila lawyer menangani suatu perkara demi kelancaran perkara tersebut
13	Pelayanan dipertahankan

14	perhatikan kesejahteraan staff pegawai juga
15	Tetap memberikan pelayanan yg terbaik dan tetaplah ramah pada pengunjung PTSP. Terima kasih
16	Transparankan semua pekerjaan di PN. Buat kotak kritik yg dilindungi kerahasiaannya. Punishment harus diumumkan.
17	pelayanan sudah baik dipertahankan & ditingkatkan
18	pelayanan sudah baik dipertahankan & ditingkatkan
19	Perkuat pengawasan
20	Sudah sangat baik dan pelayanan cepat .
21	Sudah bagus dan tertib
22	Hakim agar lebih objektif lagi dlam memutus perkara
23	Jadwal sidang diatur supaya lebih efektif dan efisien seperti di Pengadilan Agama.
24	mantap
25	Lebih ditingkatkan
26	Mohon Hakim dan PP patuhi jadwal sidang e-court karena saya mengalami jadwal sidang e-court lawan diberikan kesepatan berkali-kali tidak hadir dengan tidak mengindahkan jadwal sidang ee-court yang telah disepakati bersama
27	Kiranya ada pengawasan yg maksimal kpd seluruh satuan kerja dgn cctv
28	Perlu tingkatkan disiplin, transparansi dan pembentukan karakter dalam mencegah dan memberantas korupsi.

29	mantap
30	intinya permantap saja pelayanannya
31	Bagus

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### 4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Makassar memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,87 atau** masuk pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

- 1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,8533;
- 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,8533;
- 3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,9;
- 4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,8866;
- 5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,88;
- 6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,88;
- 7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,8533;
- 8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,8466;
- 9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,84;
- 10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,933;

#### 4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar .Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,84 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Pecaloan memiliki indeks paling rendah diantara indikator

lainnya.

Demikian Laporan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi ini

kami buat sekiranya dapat digunakan sebagai acuan untuk

lebih meningkatkan lagi Indeks Persepsi Anti Korupsi dan

dapat mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar bebas dari

korupsi. Amin.

Makassar, 31 Maret 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

TITO SUHUD, S.H., M.H.

NIP. 196407211992121001

 $Laporan\ Hasil\ Pelaksanaan\ Survei\ Persepsi\ Anti\ Korupsi\ |\ 30$ 



## KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS



#### **TAHUN 2020**

IDEN	TITAS	RESPO	NDEN	:

1.	Nama	:(bole	h inisial atau tidak diisi)
2.	Instansi/Perusahaan:		
3.	Umur (Tahun)	:	
4.	Jenis Kelamin	: 1. Laki – laki	2. Perempuan
5.	Domisili Kecamatan :		
6.	Pendidikan terkahir: 1. Tic	lak sekolah	5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
		2. SD	6. Sarjana (S1)
		3. SMP/SLTP	7. Pasca Sarjana (S2/S3)
		4. SLTA	
7.	Pekerjaan Utama :	1. PNS	5. Petani/Nelayan/Pedagang
		2. TNI/Polri	6. Pengacara/Jaksa/Notaris
		3. Pegawai Swasta	7. Pelajar / Mahasiswa
		4. Wiraswasta	8. Lainnya
8. 1	Layanan yg digunakan :	1. Pidana	6. PHI.
		2. Pdt Gugatan	7. Persidangan
		3. Pdt Permohonan	8. Pengesahan
		4. Tipikor	9. Surat Keterangan
		5. Niaga	10. Lainnya

#### **PETUNJUK:**

- 1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- 2. Cara pengisian Kuesioner Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang ( X ) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

#### **KUESIONER:**

Pertanyaan-pertanyaan Survei						
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolah an
Ekste	rnal					
1.	Apakah pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur dan ketentuan dan dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	1	2	3	4	
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan dengan ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4	
4.	Apakah selalu susah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? ( <b>Transaksi Biaya</b> )	1	2	3	4	
5.	Apakah selalu membayar tidak sesuai tarif resmi dan ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4	
6.	Apakah anda memberi tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	1	2	3	4	
7.	Tidak merima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya)	1	2	3	4	
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)	1	2	3	4	
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4	
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan ? (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4	

Selanjutny	ya, mohon	Bpk/l	lbu/Sdr d	apat m	emberikan 1	nasukan
dan panda	ngan peng	guna l	ayanan Sa	tuan K	erja pada pe	ngadilan
terhadap	persepsi	anti	korupsi	pada	Pengadilan	Negeri
Makassar:						
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••		
Selanjutny	ya, mohon	Bpk/l	ibu/Sdr d	apat m	emberikan 1	nasukan
dan panda	ngan peng	guna la	ayanan Sa	tuan K	erja pada pe	ngadilan
terhadap	persepsi	anti	korupsi	pada	Pengadilan	Negeri
Makassar:						
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••

#### **PETUGAS PELAKSANA:**

1.	Pe	tugas :	
	>	Nama	·
	>	Tanda Tangan	
	>	Tanggal Pelaksana	:
2.	Pe	ncacah/Penghitung	hasil survei :
	>	Nama	:
	>	Tanda Tangan	:
	>	Tanggal Pelaksana	·
3.	Pe	ngawas/Pemeriksa :	
	>	Nama	·
	>	Tanda Tangan	·
		Tanggal Pelaksana	•